

Jurnal 1

by Yuni Harmawati

Submission date: 04-Aug-2019 07:27PM (UTC-0700)

Submission ID: 1157644917

File name: Jurnal_April_2018.pdf (458.28K)

Word count: 3292

Character count: 22602

3

WARGA NEGARA DAN MASALAH KONTEMPORER DALAM PARADIGMA PEMBANGUNAN

Yuni Harmawati¹, Bella Putri Maharani Lubis²
Universitas PGRI Madiun¹, Universitas PGRI Madiun²
yuniharmawati@unipma.ac.¹; id bputrilubis@gmail.com²

Naskah diterima: 21/03/2018 revisi: 23/04/2018 disetujui: 30/04/2018

3

Abstrak

3
Globalisasi dan modernisasi dunia yang memperlihatkan kemajuan disegala bidang. Dampak negatif modernisasi dan globalisasi yakni kemiskinan, yang terjadi negara-negara sulit berwarna seperti di Asia dan Afrika. Negara berkembang banyak terjadi eksploitasi, yakni eksploitasi manusia atas manusia tanpa terkecuali di Indonesia. Paradigma pertumbuhan (growth paradigm) hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat karena paradigma ini dalam penerapan belum dapat meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Berdasarkan ulasan tersebut, artikel ini bertujuan untuk memaparkan secara komprehensif warga negara dan masalah kontemporer dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data bersumber dari buku, jurnal dan artikel ilmiah lainnya. Hasil dari pembahasan artikel ini adalah Pendekatan pembangunan ini menekankan pentingnya, inisiatif, kreatifitas, dan inovasi yang berpijak pada keinginan masyarakat. Dengan mendengar aspirasi dari warga negara untuk disampaikan kepada pemerintah membuat terjalin sinergitas diantara keduanya sehingga persoalan kemiskinan dapat diselesaikan secara bersama-sama.

Kata kunci: Pembangunan, Masalah Kontemporer, Warga Negara

CITIZENS AND CONTEMPORARY ISSUES IN DEVELOPMENT PARADIGM

Abstract

Globalisasi and the modernization of the world showing the progress of the real field. The negative effects of modernization and globalisasi i.e. poverty, which took place the countries of color such as in Asia and Africa. Many developing countries occurs exploitation, i.e. the exploitation of human beings over a human without exception in Indonesia. The paradigm of growth (the growth paradigm) only benefits a small portion of the community because of this paradigm in the application has not been able to improve overall well-being. Based on tersebut reviews, this article aims to expose comprehensively citizens and contemporary problems in realizing a prosperous society. The writing of this article using qualitative research methods a descriptive approach to the study of librarianship. Data sourced from books, journals and other scientific articles. The result of the discussion of this article is to emphasize the importance of this approach to development, initiative, creativity, and innovation that berpijak on the wishes of the community. By hearing the aspirations of citizens for the Government conveyed to create synergy between the two so intertwined issues of poverty be solved collectively.

Keywords: Development, Contemporary Issues, Citizen

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia hingga saat ini menjadi momok yang mengancam bagi seluruh elemen bangsa. Masalah kemiskinan selalu memperoleh perhatian utama di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kesadaran bahwa kegagalan mengatasi kemiskinan akan menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik. Bahkan hingga menjatuhkan suatu rezim pemerintahan, seperti yang terjadi pada orde baru 1998.

Beberapa hal yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan telah dilakukan sejak era Orde Baru. Hasilnya, pada tahun 1970-1976 angka kemiskinan menurun dari 40% hingga 11% pada tahun 1996 (Mubyarto dalam Erwanto, 2007). Indonesia banyak mendapatkan pujian dalam keberhasilan ini. Pada tahun 1993, World Bank menerbitkan laporan yang berjudul: *The East Asian Miracle*. Laporan ini menuliskan bahwa Indonesia sejajar dengan Korea Selatan, Taiwan, Malaysia dan Singapura yaitu menjadi salah satu Macan Asia. Setelah laporan tersebut terbit pada tahun 1997 krisis ekonomi melanda Indonesia. Persoalan awal krisis ini adalah nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Pada saat itu pemerintah sulit untuk mengendalikan krisis tersebut. Krisis yang tanpa terkendali ini lalu melahirkan krisis politik yang akhirnya menjatuhkan Orde Baru.

Seiring berjalannya waktu, krisis ini membesar dan melahirkan berbagai krisis lainnya. Krisis moneter kemudian berubah menjadi krisis multi dimensi. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, tingkat kemiskinan yang sebelumnya 11% terjun bebas menjadi 24% di tahun 1998. Masalah kemiskinan memang bukan hal yang baru di Indonesia. Meskipun demikian, masalah kemiskinan selalu aktual untuk dibahas. Meskipun telah berjuang puluhan tahun untuk membebaskan diri dari kemiskinan, kenyataan menunjukkan

bahwa Indonesia belum bisa melepaskan diri dari belenggu kemiskinan ini.

Belum selesainya pemberantasan kemiskinan hari ini dianggap begitu penting karena kritik yang pedas terhadap pembangunan rezim sebelumnya yang berorientasi pada pertumbuhan (Soetomo, 2009). Orientasi ini menyebabkan pembangunan menjadi sentralistis dan *top down*. Terjadilah dominasi negara di satu sisi dan marginalisasi masyarakat di sisi lain, terutama dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Akibatnya, secara makro pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi secara mikro kesejahteraan di lapis bawah masyarakat kurang tersentuh. Akibatnya, pemerintah sendirilah yang menjadikan rakyat terlalu bergantung terhadap bantuan negara.

Upaya pengentasan kemiskinan salah satunya ialah melalui berbagai program dan kebijakan. "Pemerintah telah melakukan program pengentasan kemiskinan, antara lain Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK) Inpres Desa Tertinggal (IDT), Kredit Usaha Tani (KUT) Kredit Modal Permanen (KMKP) dan PDM-DKE" (Erwanto, 2007).

Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai definisi yang beragam. Indikator yang digunakan oleh World Bank adalah ukuran daya beli. Sedangkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan kemiskinan berdasarkan pada garis kemiskinan. Nilai garis kemiskinan yaitu kebutuhan minimum yang dibutuhkan seseorang. Kebutuhan minimum seseorang adalah 2100 kalori per kapita. Kemudian ditambah dengan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan berupa non-makan seperti: sandang, papan, sekolah, kebutuhan rumah tangga, transportasi. Menurut BPS mereka yang mempunyai pengeluaran lebih rendah dari garis kemiskinan dapat dikatakan miskin. Sedangkan Bappenas (2004) mendefinisikan "kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok laki dan perempuan yang tidak mampu memenuhi

hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat". "Hak-hak dasar tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik" (Erwanto, 2007).

Konsep kemiskinan bersifat multidimensional, menurut Tjokrowinoto (dalam Sulistiyani, 2004:27) "kemiskinan bukanlah sekedar persoalan kesejahteraan (*welfare*); kemiskinan juga menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilan untuk kebutuhan konsumsi, rendahnya akses terhadap pasar dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwariskan antar generasi".

Chambers (dalam Bagong Suyanto, 2013) menemukan bahwa inti dari masalah kemiskinan adalah karena adanya perangkap kemiskinan (*deprivation trap*) yang terdiri dari 5 (lima) mata rantai yang sering disebut sebagai lingkaran setan atau sindrom kemiskinan, yaitu:

Kemiskinan, merupakan satu faktor yang paling menentukan. Kekurangan makan mengakibatkan¹¹ kelemahan jasmani kemudian karena tidak mempunyai kekayaan ini mengakibatkan tidak berdaya dan kehilangan kesejahteraan dan pada akhirnya orang yang miskin tidak mempunyai suara. **Kelemahan jasmani**, Tubuh yang lemah mengakibatkan orang menjadi tidak berdaya. jasmani yang lemah

akan menjadikan terbatasnya kemampuan seseorang.

Isolasi, kurangnya pendidikan dikarenakan tempat tinggal yang jauh dan terpencil mengakibatkan terisolasi dari masyarakat⁶ kitar dan terhambatnya komunikasi.. Isolasi bergandengan dengan kelemahan jasmani: rumah tangga yang hidup jauh terpencil mungkin ditinggal pergi oleh anggota keluarga dewasa untuk mencari kerja ke kota. Isolasi⁶ memperkuat kerentanan karena bantuan tidak dapat segera didatangkan apabila terjadi hal yang darurat seperti kelaparan atau wabah penyakit. Orang yang buta huruf juga mudah ditipu. Isolasi juga bermakna kurangnya hubungan dengan pemimpin politik dan bantuan hukum.

Kerentanan, hal ini berkaitan dengan¹¹ miskin. Seseorang terpaksa menukar waktu dan tenaga dengan uang. Kaitannya dengan isolasi berupa sikap-sikap menyingkirkan diri. Menyingkir¹¹ diri baik secara fisik maupun sosial. Kaitannya dengan ketidakberdayaan dicerminkan dengan ketergantungan terhadap majikan.

Ketidakberdayaan, ketidakberdayaan adalah ketidakmampuan melakukan suatu tindakan. Kemudian akibat dari ketidakberdayaan tersebut akhirnya akan⁶ menjadi beban bagi orang lain disekitarnya. Orang yang tidak berdaya seringkali terbatas atau tidak mempunyai akses terhadap bantuan pemerintah. Faktor ini pun mendorong kelemahan jasmani karena bantuan pangan tidak sampai ke tujuannya. Isolasi berkaitan dengan ketidakberdayaan mental.

Tabel Persentase Kemiskinan di Indonesia Periode 1976-2003

Tahun	Batas Miskin (Rp/perkapita/ bln)		Persentase Penduduk Miskin			Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)			Perubahan Absolut (juta)
	Kota	Desa	Kota	Desa	Total	Kota	Desa	Total	
1976	4522	2840	38,8	40,4	40,1	10,0	44,2	54,2	-7,0
1978	4969	2981	30,8	33,4	33,3	8,3	38,9	47,2	-7,0
1980	6831	4449	29,0	28,4	28,6	9,5	32,8	42,3	-4,9
1981	9777	5877	28,1	26,5	26,9	9,3	31,3	40,6	-1,7
1984	13731	7746	23,1	21,2	21,2	9,3	25,7	35,0	5,6
1987	17381	10294	20,1	16,1	16,1	9,7	20,3	30,0	5,0
1990	20614	13295	16,8	14,3	14,3	9,4	17,8	27,2	-2,8
1993	27905	18244	13,4	13,8	13,7	8,7	17,2	25,9	-1,3
1996	38246	27413	9,7	12,3	11,3	7,2	15,3	22,5	-3,4
1998	96959	72780	21,9	25,7	24,2	17,6	31,9	49,5	27
1999	92409	74272	19,5	26,1	23,5	15,7	32,7	48,4	-1,1
2000	91632	73648	14,6	22,38	19,14	12,3	26,4	37,5	-10,9
2001	100011	80382	9,79	24,84	18,41	8,6	29,3	38,7	1,2
2002	130499	96512	14,46	21,1	18,20	13,3	25,1	37,9	-0,8
2003*	130499	105.888				12,3	25,1	38,4	0,5

(Data BPS 2002 dalam Erwanto, 2007)

Tabel di atas menunjukkan bahwa kemiskinan menurun terus menerus selama pemerintahan orde baru. Namun dalam sekejap, krisis 1997-1998 menghapuskan prestasi tersebut. Jumlah orang miskin yang sempat mencapai angka 11,3% atau 22,5 juta penduduk pada tahun 1996, secara spektakuler meledak jadi 24,2% atau 49,5 juta penduduk Indonesia pada waktu itu. Kondisi ini menunjukkan betapa rapuhnya perekonomian Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk miskin yang berlipatganda jumlahnya di pedesaan dibandingkan perkotaan juga menunjukkan watak pembangunan orde baru yang bias perkotaan (Erwanto, 2007).

Keadaan darurat seperti ini tentu membutuhkan pendekatan yang intensif dan ekstra untuk menanggulangi kemiskinan. Oleh karena itu, menanggulangi masalah kemiskinan dalam pembangunan, haruslah dengan strategi yang dapat memperkuat peran dan posisi perekonomian masyarakat. Sehingga terjadi perubahan struktural yang

meliputi pengalokasian sumberdaya, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia (Sumodiningrat dalam Nurchasanah, 2010).

Pendapat dari Sumodiningrat senada dengan temuan studi dari Rahwani,dkk (dalam Pangkatan, 2014) yang menyebutkan bahwa banyak program pemerintah gagal mengubah kondisi kemiskinan karena penentuan kelompok sasaran sangat dipengaruhi oleh kepentingan aparat pelaksana, sehingga kelompok yang harusnya paling membutuhkan justru terpinggirkan.

Paradigma Pembangunan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah bagian penting dalam pembangunan masyarakat. Korten (dalam Sulistiyani, 2004: 37-39) menyatakan bahwa:

“ada dua pendekatan dalam pembangunan selama ini, yaitu *top-*

down dan bottom-up. Pendekatan *top-down* dilaksanakan dengan *blueprint strategy* (cetak biru) yang bersumber dari pemerintah dengan masyarakat hanyalah sebagai sasaran atau obyek pembangunan saja. Sebaliknya, pendekatan *bottom-up* adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi atau sering juga disebut dengan *people centered development*.”

Sayangnya, pendekatan *top-down* sudah banyak dikritik karena memiliki banyak kelemahan. Kelemahan yang paling menonjol adalah mematikan inisiatif dan kreativitas masyarakat. Bentuk penyeragaman dalam pendekatan ini juga menimbulkan banyak masalah. Cara pandang yang kaku juga telah mengabaikan kekhususan dan potensi tiap wilayah. Pendekatan ini tidak memperhatikan aspek sosial budaya, perbedaan potensi wilayah, kemampuan sumber daya manusia sehingga program pembangunan sampai dengan bentuk kegiatan dibuat seragam untuk semua wilayah. Akibat buruknya adalah produk-produk pembangunan seringkali tidak atau kurang bermanfaat untuk masyarakat.

Pendekatan *bottom-up* merupakan pendekatan yang ideal karena mempertimbangkan inisiatif, kreativitas dan mengakomodasi wilayah, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan ini sesungguhnya merupakan visualisasi dari pemberdayaan masyarakat (Sulistiyani, 2004:39). Akan tetapi karena sangat ideal, tentu menjadi sangat sulit ketika harus menunggu tumbuhnya inisiatif dari masyarakat. Kondisi masyarakat Indonesia belum seluruhnya memiliki perilaku peduli, inisiatif dan kemampuan yang memadai. Sebagian besar dari masyarakat Indonesia

menunggu perintah, sehingga tinggal menjadi pelaksana saja bukan konseptor. Untuk benar-benar melaksanakan pembangunan *bottom-up* / pemberdayaan murni, dibutuhkan tipologi masyarakat yang lebih terbuka, demokratis, inovatif dan bersedia untuk bekerja keras.

Oleh karena itu, menurut Sulistiyani (2004:40) pendekatan pembangunan di Indonesia lebih relevan menggunakan *mix model*, antara *top-down* dengan *bottom-up*. Yaitu konsep umum program pembangunan telah dibentuk oleh pemangku kebijakan, yang sifatnya masih umum (*policy*). Pihak pemerintah daerah dapat menginterpretasikan kebijakan tersebut untuk kepentingan lokal, yang sifatnya lebih spesifik dan kasuistik (*policy guideliness*). Sedangkan di tingkat masyarakat lokal, dilakukan musyawarah kembali untuk menginterpretasikan *policy guideliness* tersebut menjadi kebijakan yang paling teknis dan operasional.

Selain penekanan pada arah pembangunan, isu besar lainnya adalah kritik pada paradigma pembangunan materialistik ala barat yang dilontarkan oleh ekonom ternama dari Pakistan Mubul ul Haq (Alhumami, 2009). Paradigma pembangunan versi barat mengukur pembangunan hanya dari aspek fisik, yang dikuantifikasi dalam perhitungan matematis dan statistik. Hasil pembangunan hanya deretan angka-angka dalam tabel dan grafik, yang melambangkan pencapaian dimensi fisik dan materi. Tak heran bila paradigma ini mengabaikan dimensi manusia subyek utama dari pembangunan dan menegasikan harkat dan martabat manusia yang paling hakiki. Haq dalam bukunya *Reflections on Human Development (1995)* merumuskan keharusan pergeseran paradigma dari “*national income accounting*” ke “*people centered policy*”, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

“The human development paradigm is concerned both with building up human capabilities through investment in

5 *people and with using those human capabilities fully through an enabling framework for growth and employment."*

Ada empat komponen esensial dalam paradigma pembangunan ini, yaitu: (1) **Kesetaraan** yang merujuk pada kesamaan dalam memperoleh akses ke sumber daya ekonomi dan politik yang menjadi hak dasar warga negara. (2) **Produktivitas** yang merujuk pada usaha-usaha sistematis yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi. Upaya ini mensyaratkan investasi di bidang SDM, infrastruktur dan finansial guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. SDM yang berkualitas nantinya akan memainkan peranan sentral pada proses pembangunan suatu bangsa. (3) **Pemberdayaan** yang merujuk pada setiap upaya membangun kapasitas masyarakat dengan cara melakukan transformasi potensi dan kemampuan sehingga mereka memiliki kemandirian, otonomi dan otoritas dalam melaksanakan pekerjaan dan mengatasi permasalahan sosial. (4) **Berkelanjutan** merujuk pada strategi dalam mengelola dan merawat modal pembangunan: fisik, manusia, finansial dan lingkungan agar bisa dimanfaatkan guna mencapai tujuan utama pembangunan.

Tema pembangunan manusia ini kini menjadi isu sentral dimana-mana, termasuk juga di Indonesia pasca reformasi. Orientasi pembangunan bergeser dari sekedar mencapai tujuan makro ekonomi menuju upaya memantapkan pembangunan manusia dan sosial (*societal development*).

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam artikel ini menggunakan studi kepustakaan atau library research. Studi kepustakaan adalah rentetan aktivitas penelitian yang berkaitan dengan bagaimana cara dan metode yang tepat

dalam pengumpulan data kajian, menapsirkan dan mendaftar serta menyiapkan kondisi kajian yang dibahas. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif-kritis. Penelitian deskriptif-kritis dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis sumber-sumber dan data-data yang bergantung pada teori-teori dan naskah-naskah yang ada untuk diterjemahkan berlandaskan tulisan-tulisan yang mengarah kepada diskusi utama.

Waktu dan Tempat Penelitian

2 Dalam penyusunan artikel ini adalah dengan menyusun anggapan dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam artikel. Anggapan dan aturan berpikir tersebut selanjutnya dilaksanakan secara teratur dalam pengelompokan dan pengolahan data.

Target/Subjek Penelitian

Target/subjek penelitian ini merupakan data-data yang berupa transkrip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan warga negara, pembangunan, masalah kontemporer.

Prosedur

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data, dan setelah semua data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, dimana teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik dokumentasi, mendata wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, internet, ataupun keterangan lainnya yang berhubungan dengan artikel untuk mencari data-data yang berupa nota, transkrip, buku, dan sebagainya yang mempunyai keterkaitan dengan artikel ini.

Teknik Analisis Data

Hal ini dilakukan dengan analisis wacana supaya tidak tumpang tindih dalam melakukan analisa. Setelah semua data terkumpul maka data tersebut dianalisis

untuk mendapatkan konklusi, dimana teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Selain itu dilakukan juga analisis isi, dimana analisis isi dengan membandingkan antara satu kajian dengan kajian yang lain dalam bidang yang sama dengan artikel ini, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan kajian-kajian tersebut dalam mencapai sasaran sebagai bahan yang disajikan sekelompok masyarakat yang menjadi objek dari kajian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program upaya pengentasan kemiskinan tersebut tidak berhasil. Hal ini dikarenakan program tersebut tidak mampu menciptakan atau membentuk kemandirian masyarakat miskin. Hal ini karena pada umumnya program-program tersebut diberikan kepada masyarakat miskin yang tidak memahami bagaimana mereka harus mengelola bantuan tersebut. Pendekatan yang demikian berakibat negatif karena bantuan yang mereka terima tidak dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang dapat memberikan dampak keberlanjutannya melainkan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sering bersifat konsumtif. Pendekatan ini menurut Bjon Hetne (dalam Ma'ruf dan Heri, 1995:viii) layaknya "memberi obat agar pasien sembuh hari ini, namun membunuhnya esok hari".

"Pembangunan ekonomi Orde Baru menganut growth development. Memang, secara pendapatan nasional meningkat tetapi temuan dilapangan justru banyak terjadi kemiskinan di masyarakat level bawah. Paradigma pertumbuhan (growth paradigm) hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat karena paradigma ini dalam penerapan belum dapat meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh atau yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin" (Yansen TP, 2014:9). "Kegagalan lain Orde Baru ialah konsep perencanaan pembangunan desa era Orde Baru yang

menggunakan konsep top-down planning. Pada model top-down, perencana pada level bawah harus menerima arahan pada level yang lebih tinggi" (Tarigan, 2006:17). Sehingga pembangunan terkesan eksploitatif dan monopolistik, mengakibatkan kebijakan pemerintah cenderung sentralistik dan penyeragaman. Yang terjadi kemudian ialah penyamaan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Padahal, daerah satu dengan daerah yang lain sudah pasti memiliki perbedaan potensi dan sumber daya masing-masing.

Selain itu, penggunaan konsep top-down pada level atas belum tentu mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat di level bawah. "Pembangunan dengan model seperti ini tidak membuka kesempatan pada pelaku pembangunan non-pemerintah, sehingga masyarakat menjadi apatis pada pembangunan, kemudian pembangunan tidak berjalan dengan baik, akibatnya program tidak didukung. Hal itu terjadi karena krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah" (Mulyadi, 2009:121). Dinamika pembangunan tersebut terulang secara terus menerus, sehingga diperlukan kebijakan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan kelompok peduli dalam proses pembangunan.

"Kritik pemerataan pembangunan menggunakan pendekatan kebijakan top-down melahirkan paradigma baru yakni pembangunan yang berpusat pada sumberdaya manusia (people centered development paradigm). Paradigma ini juga dikenal sebagai paradigma pembangunan partisipatif (participative approach) atau juga disebut bottom-up planing" (Yansen TP, 2014:10). "Pendekatan pembangunan ini dinilai ideal, karena perencanaan pembangunan didasarkan penggalian aspirasi dari bawah. Belajar dari pengalaman pahit Orde Baru, maka diperlukan reorientasi pembangunan yang lebih manusiawi, maka hingga saat ini pembangunan manusia yang memprioritaskan pembangunan sosial dan

lingkungan guna mendukung pertumbuhan ekonomi melalui strategi sustainable development” (Sasmita, 2013:13).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pemerintahan silih berganti, tetapi kemiskinan tetap abadi. Banyak model, strategi dan konsep telah dilakukan baik Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) akan tetapi hal itu tidak mengalami dampak peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Pemerintah acap kali mengklaim bahwa kebijakan dan program mencapai keberhasilan. Padahal banyak temuan dilapangan, banyak yang berada di akar rumput belum menjadi sasaran.

Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan komprehensif, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun kelompok peduli. Kemiskinan bukanlah suatu kutukan. Apabila suatu negara hendak melepaskan diri dari belenggu kemiskinan, maka komponen negara tersebutlah yang dapat melepaskannya sendiri. Sebagaimana Firman Allah SWT :

“Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, sehingga kaum tersebut merubah nasibnya sendiri”.

Saran

Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan komprehensif, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun kelompok peduli. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab

pemerintah saja, tetapi menjadi tanggungjawab seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Mubyarto. (1996). Strategi Pembangunan Masyarakat Desa di Indonesia. Yogyakarta : Aditya Media.
- Mulyadi, Muhammad. (2009). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Masyarakat Desa . Tangerang: Nadi Pustaka
- Padan, Yansen Tipa. (2014). Revolusi dari Desa. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Rustiadi, Ernani dkk. (2009). Perencanaan dan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sasmita, Rahardjo Adi. (2013). Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Schaefer, Richard T. (2000). Sosiologi. Jakarta : Salemba Humanika
- Soetomo. (2009). Pembangunan Masyarakat : Merangkai Sebuah Kerangka. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sulistayani, Ambar Teguh. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta : Gava Media.
- Suyanto, Bagong. (2013). Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penangannya. Malang : Intrans Publishing.
- Tarigan, Robinson. (2006). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Sunyoto. (2012). Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Budi - Putra. "PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS MANAJEMEN QOLBU DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER RELIGIUS SEBAGAI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PESANTREN", Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 2018 Publication	5%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
3	www.scilit.net Internet Source	3%
4	media.neliti.com Internet Source	2%
5	www.lontaralutim.com Internet Source	2%
6	issuu.com Internet Source	2%
7	www.jp.feb.unsoed.ac.id	

Internet Source

2%

8 indridini.blogspot.co.id
Internet Source

2%

9 repository.ar-raniry.ac.id
Internet Source

2%

10 plpbkmulyaharja.blogspot.com
Internet Source

1%

11 zulakmal36.wordpress.com
Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 40 words

Exclude bibliography On